

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Mulai populernya istilah “tata kelola perusahaan yang baik” atau yang lebih dikenal dengan istilah asing *Good Corporate Governance* (GCG) tidak dapat dilepaskan dari maraknya skandal perusahaan yang menimpa perusahaan-perusahaan besar, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di Amerika Serikat. Beberapa perusahaan besar di Indonesia ada yang bermasalah dan bahkan tidak mampu lagi meneruskan kegiatan usahanya akibat menjalankan praktik tata kelola perusahaan yang buruk (*bad corporate governance*). Contohnya antara lain: bank-bank pemerintah yang telah dilikuidasi/ dimerger (Bank Pembangunan Indonesia – Bapindo, Bank Dagang Negara – BDN, Bank Bumi Daya—BBD, Bank Export-Import—Bank Exim); PT. Indorayon (sebuah perusahaan pabrik kertas di Sumatra Utara); PT. Dirgantara Indonesia(sebuah pabrik pesawat terbang yang berkantor pusat di Bandung); dan PT. Lapindo Brantas(sebuah perusahaan eksplorasi minyak dan gas di Sidoarjo, Jawa Timur).

Pada intinya, timbulnya krisis ekonomi di Indonesia ini disebabkan oleh tata kelola perusahaan yang buruk (*bad corporate governance*) dan tata kelola pemerintahan yang buruk pula(*bad government governance*) sehingga memberi peluang besar timbulnya praktik- praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

GCG menjadi salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang, sekaligus memenangkan persaingan bisnis global terutama bagi perusahaan yang telah mampu berkembang sekaligus menjadi terbuka. GCG merupakan sistem mengenai bagaimana suatu organisasi dikelola dan dikendalikan. Sistem *governance* antara lain mengatur mekanisme pengambilan keputusan pada tingkat atas organisasi. *Corporate governance* mengatur hubungan antar Dewan Komisaris, Direksi, dan manajemen perusahaan agar terjadi keseimbangan dalam pengelolaan organisasi. GCG adalah sistem dan struktur yang baik untuk mengelola perusahaan dengan tujuan menaikkan nilai pemegang saham serta mengakomodasikan berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (*stakeholders*) seperti kreditor, pemasok, asosiasi bisnis, konsumen, karyawan, pemerintah, serta masyarakat umum.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah salah satu pelaku ekonomi dengan misi yang dimilikinya saat ini menghadapi tantangan kompetisi global dunia usaha yang semakin besar. BUMN diharapkan mampu menaikkan efisiensinya sehingga menjadi unit usaha yang sehat dan memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan interaksinya dan aspek-aspek kehidupan nasional. BUMN harus peka terhadap setiap perkembangan yang terjadi dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan dunia usaha, sehingga profesionalisme BUMN disegala bidang terus meningkat, baik dalam bidang perencanaan dan pelaksanaan maupun dalam bidang pengendalian dan pengawasan. Disamping itu BUMN bukan lagi anak emas perusahaan sehingga manajemen dituntut untuk lebih mandiri dan profesional dalam menjalankan tugasnya. Di dalam praktiknya penerapan GCG pada BUMN bukanlah hal mudah untuk dilakukan walaupun ada beberapa BUMN yang sudah mulai memperkenalkan

GCG tetapi belum menerapkannya secara menyeluruh. Penerapan GCG di dalam praktiknya merupakan hal yang mendesak, hal ini dikarenakan sistem pengelolaan yang tidak profesional.

Peran auditor internal yang independen sangat penting dalam penerapan GCG di perusahaan, dimana anggota auditor internal tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada perusahaan tersebut, tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan direksi, komisaris dan pemegang saham utama perusahaan tersebut, dan tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan tersebut. GCG juga menuntut sejauh mana Auditor Internal dapat berperan dengan baik untuk mewujudkannya pada sektor publik maupun pada sektor swasta. Auditor Internal dituntut untuk menyediakan informasi mengenai kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal yang ada di dalam perusahaan. Auditor Internal haruslah seseorang yang mempunyai kompetensi di bidang keuangan, karena Auditor Internal lebih berperan untuk mengawasi kegiatan manajemen, kompetensi di bidang audit merupakan suatu keharusan bagi seseorang yang akan melakukan tugasnya di bidang audit. Disamping pengetahuan di bidang audit, auditor tentunya diharapkan mempunyai pengetahuan yang memadai dalam substansi yang diaudit karena itulah kompetensi anggota internal audit sangat diperlukan untuk menjembatani kebutuhan Dewan Komisaris akan peran auditing dan pengendalian internal yang efektif dengan kendala daya serap terhadap masalah-masalah yang teknis dalam akuntansi, auditing dan pengendalian internal.

Auditor Internal yang independen dapat berfungsi untuk mengawasi jalannya perusahaan dengan memastikan bahwa perusahaan tersebut telah melakukan praktik-praktik dalam penerapan prinsip-prinsip GCG di dalam perusahaan yang meliputi:

akuntabilitas (*accountability*), pertanggung-jawaban (*responsibility*), keterbukaan (*transparency*), kewajaran (*fairness*) serta kemandirian (*independency*), merupakan upaya agar terciptanya keseimbangan antar kepentingan dari para *stakeholder*, karyawan perusahaan, pemasok, pemerintah, konsumen yang merupakan indikator tercapainya keseimbangan kepentingan, sehingga benturan kepentingan yang terjadi dapat diarahkan dan dikontrol serta tidak menimbulkan kerugian pada masing-masing pihak.

Prinsip-prinsip GCG ini dapat diterapkan dengan baik apabila perusahaan juga memiliki pengendalian internal yang baik. GCG merupakan alat pengendalian internal yang berperan penting untuk mengurangi masalah yang timbul dalam perusahaan, karena GCG bermanfaat untuk perbaikan komunikasi, meminimalkan benturan, fokus pada strategi utama, serta peningkatan kepuasan pelanggan dan perolehan kepercayaan investor (*stakeholders*). Pengendalian internal memiliki peran yang penting terhadap penerapan GCG, sehingga harus difungsikan sebagai penilaian yang independen dalam membantu manajemen melaksanakan tanggungjawabnya.

Berdasarkan SK Menteri BUMN Nomor KEP-117/M-MBU/2002. Pasal 2 tentang penerapan praktek *Good Corporate Governance* (GCG) pada BUMN, dinyatakan bahwa “BUMN diwajibkan untuk menerapkan GCG secara konsisten dan menjadikan GCG sebagai landasan operasionalnya”. Sehingga perusahaan-perusahaan dituntut mengambil langkah komprehensif terhadap aset-asetnya agar dapat menghasilkan profit berbentuk pemasukan kas sehingga memiliki nilai tambah (*value added*). Bank, BUMN, dan perusahaan publik yang terdaftar di bursa saham, sebagai tulang punggung perekonomian nasional diharapkan menjadi teladan dalam menerapkan *corporate governance* yang efektif.

Pentingnya pengendalian internal dan adanya Satuan Pengawasan Internal (SPI) diatur dalam SK Menteri BUMN Nomor kep-117/M-MBU/ 2002. Pada pasal 11 dinyatakan bahwa “ direksi harus menetapkan suatu sistem pengendalian internal yang efektif untuk mengamankan investasi dari aset BUMN” dan UU BUMN Nomor 19 Tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003 juga telah mewajibkan BUMN untuk membentuk unit pengendalian internal.

Dengan berjalannya waktu, beberapa peneliti mulai membandingkan *good corporate governance* (GCG) dengan informasi lainnya, salah satunya peran internal audit. Para peneliti ingin membuktikan peran audit internal selain menerapkan *good corporate governance* (GCG). Nisfusa (2005) menguji pengaruh profesionalisme auditor internal terhadap kualitas laporan hasil pemeriksaan auditor internal pada BUMN (suatu kasus PT. Antam Tbk). Hasil penelitian ini diketahui bahwa pengaruh profesionalisme auditor internal terhadap kualitas laporan hasil pemeriksaan auditor internal pada PT Antam Tbk memiliki pengaruh sebesar 20,25%. Angka ini menunjukkan bahwa pengaruh profesionalisme auditor internal terhadap kualitas laporan hasil pemeriksaan auditor internal pada PT. Antam Tbk tergolong rendah.

Ramdan (2011) menguji pengaruh penerapan *Good Corporate Governance* terhadap kinerja perusahaan. Hasil penelitian menghasilkan *p value* $0.793 > \alpha 0.05$ dan $R=0.063$, menunjukkan bahwa terdapat pengaruh tidak signifikan penerapan GCG terhadap ROA. R^2 *adjusted* menunjukkan 0,39%, artinya hanya sebesar 0.39% perubahan ROA yang dapat dijelaskan oleh variabel GCG. Sisanya sebesar 99.6031% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dijelaskan variabel GCG.

Gumilang (2009) meneliti pengaruh audit internal terhadap penerapan *Good Corporate Governance* pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan audit internal berpengaruh positif terhadap penerapan GCG. Hasil analisa regresi secara keseluruhan menunjukkan *R Square* sebesar 0,148 yang berarti bahwa korelasi/ hubungan antara peranan audit internal dengan penerapan GCG tidak mempunyai hubungan yang kuat sebesar 14,8%.

Fadilah (2011) meneliti pengaruh profesionalisme auditor internal terhadap efektifitas pengelolaan *Enterprise Risk Management* (ERM). Berdasarkan hasil dari penelitian dengan pengujian statistik dengan menggunakan analisis regresi, profesionalisme auditor internal memiliki hubungan yang searah atau positif dengan efektifitas pengelolaan ERM dan pada tingkat signifikansi 5% profesionalisme auditor internal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektifitas pengelolaan *Enterprise Risk Management*.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Pengaruh Peranan Audit Internal terhadap Penerapan *Good Corporate Governance* pada PT.SIPATEX.”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, peneliti bermaksud untuk mendapatkan bukti secara empiris mengenai: Apakah peran audit internal berpengaruh positif terhadap penerapan *Good Corporate Governance* pada PT. SIPATEX ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menemukan bukti empiris mengenai ada pengaruh positif peran audit internal terhadap penerapan *Good Corporate Governance* pada PT.SIPATEX.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan bisa sebagai bahan masukan berupa saran dalam peningkatan kualitas peranan audit internal sejalan dengan penerapan *Good Corporate Governance*.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi peneliti untuk melakukan penelitian dan bisa menjadi bahan perbandingan dengan peneliti lainnya.

3. Bagi masyarakat

Dengan penelitian ini diharapkan agar masyarakat dapat mengetahui adanya penerapan *Good Corporate Governance* juga di perusahaan swasta. Diharapkan bagi para investor, kreditur, dan pemerintah dapat mengetahui adanya penerapan *Good Corporate Governance* di PT. SIPATEX sehingga dapat menunjang keberlanjutan usaha PT. SIPATEX.